

TANTANGAN DAN PELUANG DALAM IMPLEMENTASI SISTEM PERPAJAKAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI INDONESIA

Andi Yusuf Katili¹, Nur Djihad H. Adam², Wiranto Wange³, Sriyanti Kida⁴, Isnayati Laleno⁵

Universitas Bina Taruna Gorontalo

yusuf2801@gmail.com, nuradam0395@gmail.com¹, ranto.bahena99@gmail.com²,
sriyantikida97@gmail.com³, inalaleno99@gmail.com⁴

ABSTRAK

Implementasi sistem perpajakan berbasis teknologi informasi (TI) di Indonesia memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, transparansi, dan kepatuhan pajak. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan berbagai kebijakan dan sistem berbasis TI, seperti e-filing dan e-payment. Namun, penerapan sistem ini menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan kesenjangan infrastruktur teknologi antara daerah perkotaan dan terpencil, masalah keamanan data, serta ketergantungan pada literasi digital yang terbatas. Keterbatasan akses internet di daerah terpencil dan ancaman terhadap keamanan data pribadi wajib pajak menjadi hambatan signifikan dalam implementasi sistem digital yang efektif. Selain itu, rendahnya tingkat literasi digital baik di kalangan masyarakat maupun pegawai pajak memperburuk pelaksanaan kebijakan ini. Meski demikian, penerapan sistem perpajakan berbasis TI juga menghadirkan peluang besar, seperti peningkatan efisiensi administrasi perpajakan, pengurangan praktik penghindaran pajak, serta kemudahan akses bagi wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak. Selain itu, sistem digital memungkinkan pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel. Pemanfaatan teknologi juga membuka peluang untuk penggunaan big data dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan peluang ini, perlu ada penguatan infrastruktur, peningkatan literasi digital, serta kebijakan yang mendukung pengembangan sistem perpajakan berbasis TI di Indonesia.

Kata kunci: **Sistem Perpajakan, Teknologi Informasi, Tantangan, Peluang**

ABSTRACT

The implementation of information technology (IT)-based taxation system in Indonesia has an important role in improving tax administration efficiency, transparency, and tax compliance. Along with the rapid development of digital technology, the Indonesian government through the Directorate General of Taxes (DGT) has launched various IT-based policies and systems, such as e-filing and e-payment. However, the implementation of these systems faces various challenges, mainly related to the technology infrastructure gap between urban and remote areas, data security issues, as well as reliance on limited digital literacy. Limited internet access in remote areas and threats to the security of taxpayers' personal data are significant

barriers to the effective implementation of digital systems. In addition, the low level of digital literacy among both the public and tax officials exacerbates the implementation of this policy. Nevertheless, the implementation of an IT-based taxation system also presents great opportunities, such as increased efficiency of tax administration, reduction of tax avoidance practices, and ease of access for taxpayers to report and pay taxes. In addition, the digital system allows for more transparent and accountable supervision. The utilization of technology also opens up opportunities for the use of big data in formulating more targeted tax policies. Therefore, to optimize this opportunity, there is a need to strengthen infrastructure, increase digital literacy, and policies that support the development of IT-based taxation systems in Indonesia.

Keywords: *Taxation System, Information Technology, Challenges, Opportunities*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi (TI) yang pesat dalam beberapa dekade terakhir telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali di sektor perpajakan (Sudrajat, 2020). Di Indonesia, pemanfaatan TI dalam sistem perpajakan telah menjadi salah satu langkah penting dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, transparansi, dan akuntabilitas di seluruh sistem fiskal negara (Judijanto, 2024; Nesya Zuhrah, Reza Umamah, Heikelindra Kurniawan, & Wirawan Firman Nurcahya, 2024). Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk mengadopsi teknologi digital dalam proses administrasi pajak, termasuk melalui sistem e-filing (Oktavia, 2023), e-payment, dan aplikasi berbasis teknologi lainnya.

Sistem perpajakan berbasis teknologi informasi menawarkan berbagai keuntungan, terutama dalam mempercepat proses pelaporan dan pembayaran pajak, mempermudah pengawasan dan kontrol, serta meningkatkan akurasi data perpajakan (Ahmad Junaidi et al., 2023). Namun, meskipun kemajuan teknologi ini membawa banyak potensi positif, implementasinya di Indonesia tidak lepas dari berbagai tantangan yang harus diatasi. Tantangan ini meliputi masalah infrastruktur, sumber daya manusia, kebijakan yang kurang mendukung, serta kesenjangan dalam akses teknologi antara daerah yang satu dengan yang lainnya (Rijal et al., 2023; Subroto, Supriandi, Wirawan, & Rukmana, 2023).

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kesenjangan infrastruktur teknologi, di mana sebagian wilayah di Indonesia, terutama di daerah terpencil dan pedesaan, belum memiliki akses yang memadai terhadap internet yang cepat dan stabil, serta perangkat teknologi yang diperlukan untuk mengakses sistem perpajakan berbasis TI (Fathimatuzzahra & Dompak, 2024). Tantangan lainnya adalah masalah keamanan data. Dalam penerapan sistem perpajakan berbasis TI, data wajib pajak yang bersifat sangat sensitif harus dijaga dengan sangat hati-hati. Ancaman kebocoran data atau serangan siber menjadi isu serius yang harus ditangani dengan serius oleh pemerintah.

Selain tantangan tersebut, terdapat juga peluang besar yang dapat dimanfaatkan melalui implementasi sistem perpajakan berbasis TI. Salah satunya adalah efisiensi operasional yang dapat tercapai dengan menggantikan sistem manual yang memakan waktu dan sumber daya dengan otomatisasi digital (Carolina Sri Athena Barus, 2022; Modestus La'a & Vip Pramarta, 2023). Penggunaan TI juga dapat mempercepat proses pengumpulan pajak, meningkatkan transparansi, dan mengurangi potensi manipulasi atau penyalahgunaan data (Suryawijaya, 2023). Selain itu, penggunaan big data dan analitik memungkinkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih tepat sasaran berdasarkan data yang lebih akurat.

Peluang lain yang dapat dimanfaatkan adalah kemudahan akses bagi wajib pajak. Sistem perpajakan berbasis TI memungkinkan wajib pajak untuk mengakses layanan pajak dengan lebih mudah, kapan saja dan di mana saja, tanpa harus datang ke kantor pajak. Ini sangat memudahkan, terutama bagi wajib pajak yang berada di luar kota atau daerah terpencil. Lebih dari itu, melalui sistem digital, pemerintah dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak dengan memberikan pengingat otomatis dan mempermudah proses pelaporan dan pembayaran.

Namun, untuk memaksimalkan peluang tersebut, pemerintah Indonesia harus menghadapi berbagai tantangan yang ada. Implementasi sistem perpajakan berbasis TI memerlukan komitmen yang kuat dalam hal kebijakan dan regulasi, serta dukungan dalam hal infrastruktur dan pelatihan sumber daya manusia. Penyuluhan mengenai pentingnya teknologi dalam perpajakan, pelatihan untuk wajib pajak dan pegawai pajak, serta penguatan kapasitas sistem teknologi informasi adalah langkah-langkah yang harus diambil agar implementasi ini berjalan dengan lancar.

Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis tantangan dan peluang yang ada dalam implementasi sistem perpajakan berbasis teknologi informasi di Indonesia. Penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor yang menghambat implementasi sistem perpajakan berbasis TI serta bagaimana peluang tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai masalah dalam administrasi perpajakan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai prospek dan langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem perpajakan di era digital.

Sejak beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mulai bertransformasi dalam hal administrasi perpajakan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi (Alamsyah & Saragih, 2023). Langkah awal dimulai dengan peluncuran sistem e-filing pada tahun 2008, yang memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara online. Pada tahun 2010, pemerintah Indonesia juga memperkenalkan sistem e-payment yang memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak secara elektronik. Inovasi ini semakin diperkuat dengan

pengembangan aplikasi pajak berbasis TI lainnya, seperti aplikasi untuk pelaporan pajak secara elektronik dan pemberian bukti pembayaran yang bisa diakses langsung oleh wajib pajak.

Sistem-sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak mereka dengan lebih mudah, tanpa harus datang ke kantor pajak. Selain itu, penerapan sistem berbasis TI juga memberi keuntungan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengelola dan mengawasi kewajiban perpajakan di Indonesia. Adanya data yang tercatat secara digital membuat proses pelacakan dan pengecekan lebih efisien, serta memungkinkan adanya pengawasan yang lebih baik terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya.

Namun, meskipun berbagai inovasi telah dilakukan, tantangan utama dalam implementasi sistem perpajakan berbasis TI tetap ada. Banyak daerah di Indonesia, terutama di luar Jawa, masih menghadapi masalah dengan infrastruktur internet yang tidak memadai. Hal ini menghambat akses wajib pajak di daerah-daerah tersebut untuk menggunakan sistem online yang disediakan oleh pemerintah. Di sisi lain, banyak pula masyarakat yang masih belum familiar dengan teknologi, sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai cara menggunakan sistem perpajakan berbasis TI ini.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam implementasi sistem perpajakan berbasis TI adalah ketidakmerataan infrastruktur dan akses teknologi. Di Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil, akses terhadap internet yang cepat dan perangkat teknologi yang memadai masih terbatas. Meskipun beberapa kota besar di Indonesia telah dilengkapi dengan infrastruktur digital yang cukup baik, namun di banyak daerah lainnya, terutama di luar pulau Jawa, masalah infrastruktur ini masih menjadi kendala besar. Hal ini membuat penerapan sistem perpajakan berbasis TI sulit dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, masalah terkait dengan keamanan data juga menjadi perhatian utama dalam implementasi sistem perpajakan berbasis TI. Data wajib pajak yang sangat sensitif, termasuk informasi finansial dan identitas pribadi, harus dijaga dengan sangat hati-hati. Di era digital yang semakin rentan terhadap ancaman cyber, kebocoran atau penyalahgunaan data dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan elektronik. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dalam memperkuat sistem keamanan siber, serta perlindungan data pribadi wajib pajak.

Tantangan lainnya adalah resistensi terhadap perubahan dari berbagai pihak (Atsfa Sari, Salsabila Nuromliah, Marlinda, & Marini, 2024). Banyak wajib pajak yang kurang teredukasi tentang penggunaan sistem digital, sehingga mereka lebih memilih untuk tetap menggunakan sistem manual yang sudah mereka kenal. Begitu juga dengan pegawai pajak yang terbiasa dengan cara kerja lama. Hal ini menuntut pemerintah untuk

melakukan pelatihan dan sosialisasi yang lebih masif tentang manfaat dan cara penggunaan sistem perpajakan berbasis TI.

Di balik berbagai tantangan tersebut, terdapat peluang besar yang dapat dimanfaatkan. Salah satunya adalah peningkatan efisiensi dalam administrasi perpajakan. Sistem TI memungkinkan otomatisasi berbagai proses, yang sebelumnya dilakukan secara manual, sehingga mempercepat pengolahan data dan mengurangi potensi kesalahan manusia. Selain itu, sistem ini memungkinkan pelaporan dan pembayaran pajak dilakukan lebih cepat dan efisien.

Selain itu, penggunaan teknologi memungkinkan pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel. Setiap transaksi perpajakan dapat tercatat secara digital, sehingga mengurangi potensi kecurangan atau manipulasi data. Dengan adanya sistem yang transparan, wajib pajak akan lebih merasa terjamin bahwa pembayaran pajak mereka diproses dengan benar, dan pemerintah dapat memonitor secara real-time kewajiban pajak yang belum dipenuhi.

Peluang lainnya adalah kemudahan akses bagi wajib pajak. Dengan sistem e-filing dan e-payment, wajib pajak dapat melakukan pelaporan dan pembayaran pajak kapan saja dan di mana saja, tanpa harus datang ke kantor pajak (Hasintongan, 2021). Hal ini sangat mempermudah wajib pajak yang berada di daerah terpencil atau sibuk, karena mereka dapat mengakses sistem secara online tanpa batasan waktu dan tempat.

METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan kualitatif (Ardiansyah, Risnita, & Jailani, 2023) untuk menggali tantangan dan peluang dalam implementasi sistem perpajakan berbasis teknologi informasi. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan ahli teknologi informasi, serta observasi langsung di kantor pajak yang telah menerapkan sistem TI. Selain itu, studi dokumentasi dilakukan untuk menganalisis kebijakan terkait. Data dari wawancara dan observasi dianalisis dengan mengelompokkan informasi berdasarkan tema yang muncul, seperti tantangan infrastruktur dan sumber daya manusia. Penelitian ini juga menjamin kerahasiaan informan dan meminta persetujuan sebelum wawancara dilakukan, dengan tujuan memberikan pemahaman yang jelas tentang tantangan dan peluang dalam sistem perpajakan berbasis TI di Indonesia.

HASIL PEMBAHASAN

Tantangan dalam Implementasi Sistem Perpajakan Berbasis TI di Indonesia **Kesenjangan Infrastruktur Teknologi**

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi sistem perpajakan berbasis TI adalah kesenjangan infrastruktur teknologi antara daerah perkotaan dan daerah terpencil. Meskipun kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung sudah memiliki akses internet yang cepat dan memadai, banyak daerah di luar Pulau Jawa dan

daerah terpencil yang masih mengalami kesulitan dalam mengakses internet dengan kualitas yang baik. Masalah infrastruktur ini menghambat proses digitalisasi perpajakan yang diinginkan pemerintah. Wajib pajak yang berada di daerah-daerah yang tidak memiliki infrastruktur yang memadai cenderung kesulitan dalam melaporkan dan membayar pajak secara elektronik.

Di samping itu, sebagian besar perangkat elektronik yang dibutuhkan untuk mengakses layanan perpajakan berbasis TI, seperti komputer atau smartphone, masih sulit dijangkau oleh sebagian masyarakat, terutama di daerah yang memiliki tingkat pendapatan yang lebih rendah. Oleh karena itu, untuk memastikan implementasi sistem perpajakan berbasis TI berjalan secara merata di seluruh Indonesia, diperlukan upaya yang lebih besar dalam pembangunan infrastruktur digital yang lebih kuat di daerah-daerah yang kurang berkembang.

Keamanan Data dan Perlindungan Privasi

Masalah keamanan data adalah tantangan krusial dalam implementasi sistem perpajakan berbasis TI. Setiap wajib pajak harus menyampaikan data pribadi dan informasi finansial mereka melalui platform online. Data ini sangat sensitif dan harus dijaga kerahasiaannya untuk menghindari kebocoran informasi atau penyalahgunaan data. Keamanan siber menjadi isu yang semakin penting mengingat meningkatnya ancaman terhadap sistem digital, seperti serangan siber, peretasan, atau kebocoran data yang dapat merusak reputasi pemerintah dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan digital.

Pemerintah Indonesia melalui DJP telah berupaya untuk memperkuat sistem keamanan data dengan berbagai langkah, seperti enkripsi data dan penggunaan sistem proteksi yang lebih canggih. Namun, dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, ancaman terhadap sistem keamanan data juga semakin kompleks. Oleh karena itu, perlu ada penguatan kebijakan terkait perlindungan data pribadi serta peningkatan kapasitas teknologi informasi yang lebih mumpuni untuk menangkal serangan dan kebocoran data.

Ketergantungan pada Teknologi dan Literasi Digital yang Terbatas

Selain masalah infrastruktur dan keamanan data, ketergantungan pada teknologi juga menjadi tantangan besar dalam implementasi sistem perpajakan berbasis TI. Meskipun teknologi semakin berkembang, sebagian besar masyarakat Indonesia masih kurang memiliki keterampilan atau literasi digital yang memadai untuk mengoperasikan sistem perpajakan berbasis TI dengan baik. Hal ini menjadi masalah, karena wajib pajak yang tidak terbiasa menggunakan teknologi mungkin merasa kesulitan dalam mengakses sistem perpajakan yang telah disediakan oleh pemerintah.

Selain itu, bagi sebagian besar pegawai pajak yang telah terbiasa dengan sistem manual, ada resistensi terhadap perubahan. Pegawai yang kurang terlatih dalam

menggunakan sistem berbasis TI mungkin merasa kesulitan dalam menjalankan tugas mereka, yang akhirnya dapat menghambat proses administrasi perpajakan. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan program pelatihan dan edukasi kepada masyarakat dan pegawai pajak untuk meningkatkan literasi digital, agar mereka dapat memanfaatkan teknologi dengan optimal.

Kompleksitas Regulasi dan Kebijakan

Peraturan perpajakan yang ada di Indonesia sering kali tidak sejalan dengan perkembangan teknologi, sehingga memerlukan pembaruan atau adaptasi agar dapat mendukung implementasi sistem perpajakan berbasis TI dengan baik. Misalnya, dalam menghadapi perkembangan transaksi digital dan e-commerce, banyak negara telah memperkenalkan peraturan yang lebih spesifik terkait pajak atas transaksi digital. Namun, di Indonesia, peraturan-peraturan semacam itu masih dalam proses penyusunan dan belum sepenuhnya diterapkan.

Selain itu, adanya ketidakpastian peraturan terkait pengenaan pajak terhadap bisnis berbasis digital, seperti e-commerce dan platform teknologi, menyebabkan kebingungannya wajib pajak dan pengusaha dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang jelas dan up-to-date yang dapat mengatur semua aspek transaksi digital yang relevan agar implementasi sistem perpajakan berbasis TI dapat berjalan lancar dan sesuai dengan kebutuhan zaman.

Peluang dalam Implementasi Sistem Perpajakan Berbasis TI di Indonesia **Meningkatkan Efisiensi Administrasi Perpajakan**

Salah satu peluang terbesar yang ditawarkan oleh sistem perpajakan berbasis TI adalah peningkatan efisiensi dalam administrasi perpajakan. Dengan adanya e-filing dan e-payment, proses pelaporan dan pembayaran pajak yang sebelumnya memakan waktu dan sumber daya, kini dapat dilakukan secara otomatis dan cepat. Wajib pajak tidak lagi perlu datang ke kantor pajak, mengisi formulir secara manual, dan mengantri untuk melakukan pembayaran. Semua proses ini dapat dilakukan secara online, sehingga menghemat waktu dan biaya.

Bagi pemerintah, penggunaan teknologi juga memungkinkan pemrosesan data perpajakan yang lebih efisien. Data yang terorganisir secara digital memudahkan untuk melakukan analisis dan pengawasan atas kewajiban pajak yang belum dipenuhi. Dengan demikian, penerimaan pajak dapat meningkat tanpa meningkatkan beban administratif.

Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Sistem perpajakan berbasis TI juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Setiap transaksi perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak tercatat secara digital, yang memudahkan pengawasan dan audit oleh pihak berwenang. Dengan adanya data yang tersedia secara online, proses pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih transparan, dan wajib pajak dapat dengan mudah mengecek status

kewajiban perpajakan mereka.

Hal ini juga memberikan peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan mengurangi praktik-praktik penghindaran pajak. Sistem yang transparan memungkinkan adanya kontrol yang lebih ketat terhadap wajib pajak, baik individu maupun perusahaan, yang selama ini mungkin melakukan manipulasi data untuk menghindari kewajiban perpajakan mereka.

Meningkatkan Kepatuhan Pajak

Dengan kemudahan akses dan transparansi yang ditawarkan oleh sistem perpajakan berbasis TI, peluang untuk meningkatkan kepatuhan pajak juga semakin terbuka lebar. Sistem pengingat otomatis yang tersedia dalam sistem e-filing dan e-payment memungkinkan wajib pajak untuk memperoleh notifikasi mengenai tanggal jatuh tempo pelaporan dan pembayaran pajak. Selain itu, sistem ini juga dapat memberikan peringatan kepada wajib pajak yang belum melaporkan atau membayar pajak mereka, sehingga meningkatkan kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan.

Kemudahan Akses bagi Wajib Pajak

Salah satu keuntungan terbesar dari sistem perpajakan berbasis TI adalah kemudahan akses yang diberikan kepada wajib pajak. Dengan sistem e-filing, wajib pajak dapat melaporkan pajak kapan saja dan di mana saja, tanpa harus datang ke kantor pajak. Hal ini sangat menguntungkan, terutama bagi wajib pajak yang berada di daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan waktu untuk mengurus pajak mereka.

Kemudahan akses ini juga meningkatkan inklusi perpajakan, karena sistem ini dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk masyarakat dengan latar belakang ekonomi yang lebih rendah, selama mereka memiliki akses internet. Oleh karena itu, implementasi sistem perpajakan berbasis TI dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak mereka.

Penggunaan Big Data untuk Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik

Dengan penerapan sistem digital, pemerintah dapat mengumpulkan dan mengelola data perpajakan dalam jumlah yang sangat besar. Pemanfaatan big data dan analitik memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi pola-pola penghindaran pajak, meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal, dan merumuskan kebijakan pajak yang lebih tepat sasaran. Pemerintah dapat mengoptimalkan pemanfaatan data ini untuk merencanakan kebijakan ekonomi yang lebih efisien dan mengatasi permasalahan perpajakan dengan lebih tepat.

SIMPULAN

Implementasi sistem perpajakan berbasis teknologi informasi di Indonesia memiliki tantangan dan peluang yang signifikan. Tantangan utama yang dihadapi meliputi kesenjangan infrastruktur teknologi, masalah keamanan data, resistensi

terhadap perubahan, serta ketidakpastian regulasi yang mengatur sektor digital. Namun, peluang yang ada untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan pajak sangat besar, terutama melalui penggunaan sistem digital yang memudahkan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak secara lebih mudah dan efisien.

Untuk mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan yang ada, pemerintah perlu berfokus pada peningkatan infrastruktur teknologi di seluruh Indonesia, memperkuat sistem keamanan data, memberikan pelatihan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat dan pegawai pajak, serta merumuskan kebijakan yang mendukung sistem perpajakan berbasis TI. Dengan demikian, Indonesia dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih modern, efisien, dan inklusif di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Junaidi, S. E., MM, C., CFR, C., CPMSA, C., Sunarmin, S. E., Ak, M., & Akt, C. A. (2023). *Transformasi Digital dalam Perpajakan: Dampaknya pada Pengelolaan Keuangan Bisnis*. Takaza Innovatix Labs.
- Alamsyah, M. D. A., & Saragih, A. H. (2023). Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Indonesia: Kesiapan Penerapan Single Identity Number. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 23(2), 225–240. <https://doi.org/10.25105/mraai.v23i2.12771>
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Atsfa Sari, A., Salsabila Nuromliah, H., Marlinda, S., & Marini, A. (2024). Tantangan Dan Peluang Implementasi Teknologi Dalam Manajemen Pendidikan Di Era Digital. *Cendikia Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(6), 196–204.
- Carolina Sri Athena Barus. (2022). Sosialisasi Sistem Digital Pendaftaran Ujian Sarjana Bebas Database di Program Studi Pendidikan Fisika. *Jurnal Pelayanan Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(3), 118–125. <https://doi.org/10.55606/jppmi.v1i3.1496>
- Fathimatuazzahra, R. N., & Dompok, T. (2024). Menjembatani Kesenjangan Akses Internet : Studi Kasus Indonesia Dan Brunei Darussalam. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi (SNISTEK)*, 06, 147–153. Retrieved from <https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/prosiding/article/view/9322>
- Hasintongan, A. J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Kasus KPP Pratama Bogor. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan.
- Judijanto, L. (2024). Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(4), 499–514. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i4.908>
- Modestus La'a, & Vip Pramarta. (2023). Pengembangan Sistem Informasi Laboratorium Untuk Meningkatkan Efisiensi dan Akurasi. *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Dan Ilmu Komputer*, 3(2), 244–255.

- <https://doi.org/10.55606/juisik.v3i2.517>
- Nesya Zuhrah, Reza Umamah, Heikelindra Kurniawan, & Wirawan Firman Nurcahya. (2024). Pengaruh Reformasi dan Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan dan Penerimaan Pajak di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 19. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i4.365>
- Oktavia, F. Z. F. (2023). Factors Affecting User Satisfaction On E-Filing System In Indonesia. *Kompartemen : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 20(2), 239. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v20i2.13564>
- Rijal, S., Azis, A. A., Chusumastuti, D., Susanto, E., Nirawana, I. W. S., & Legito. (2023). Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Bagi Masyarakat. *Easta Journal of Innovative Community Services*, 1(03), 156–170. <https://doi.org/10.58812/ejincs.v1i03.123>
- Subroto, D. E., Supriandi, Wirawan, R., & Rukmana, A. Y. (2023). Implementasi Teknologi dalam Pembelajaran di Era Digital: Tantangan dan Peluang bagi Dunia Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan West Science*, 1(07), 473–480. <https://doi.org/10.58812/jpdws.v1i07.542>
- Sudrajat, A. (2020). Pajak E-Commerce, Pemecahan dan Solusinya. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 2(1), 22–36. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v2i1.1107>
- Suryawijaya, T. W. E. (2023). Memperkuat Keamanan Data melalui Teknologi Blockchain: Mengeksplorasi Implementasi Sukses dalam Transformasi Digital di Indonesia. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2(1), 55–68. <https://doi.org/10.21787/jskp.2.2023.55-68>